

PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, INFLASI DAN KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Ria Indriastuti

NIM. 12020112140042

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ria Indriastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140042
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA,
INFLASI DAN KETERBUKAAN EKONOMI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Miyasto, SU.

Semarang, 4 Maret 2017

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Miyasto, SU)

NIP. 195012251975011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ria Indriastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140042
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA,
INFLASI DAN KETERBUKAAN EKONOMI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 17 Maret 2017

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Miyasto, SU (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, M.Si (.....)
3. Nenik Woyanti, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt

NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ria Indriastuti, menyatakan bahwa skripsi dengan Judul: Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Indonesia, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,

(Ria Indriastuti)

NIM: 12020112140042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ I have not failed. I’ve just found 10.000 ways that won’t work. ”

(Thomas A. Edison)

“Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing.”

(Abraham Lincoln)

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Ibu saya tercinta (almh.) Puji Kinasih

ABSTRACT

Tax revenue has been a major contribution to Indonesia's Government, especially since 2000. Although tax revenue has been a main source, in the implementation there are several problems are tax ratio and tax buoyancy low, the number of realized tax revenue are smaller than the target, the fall in the percentage realized tax revenue to target and low awareness of paying taxes. To solve that problems, economic factors also need to be included in addition to see their effects to tax revenue.

The goals of this research was to analyze the effect of income per capita, inflation and openness to tax revenue. This study uses a Keynes Theory and Romer - Lucas Theory.

The data used is secondary data obtained from the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, Central Statistics Institution and World Bank. The approach used is a Multiple Linear Regression with time series data 1984 – 2015. Dependent variable of this research is tax revenue with income per capita, inflation and openness as independent variable.

The results showed that the variable inflation negatively affects tax revenue significantly and openness positively affects tax revenue significantly. Meanwhile, variable income per capita does not have a significant effect on tax revenue.

Keywords: Tax revenue, Income per capita, Inflation, Openness

ABSTRAK

Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan yang diandalkan oleh Pemerintah Indonesia, terutamanya sejak tahun 2000. Walaupun menjadi andalan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti *tax ratio* dan *tax buoyancy* yang rendah, realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target, turunnya persentase realisasi terhadap target penerimaan pajak serta masih rendahnya kesadaran membayar pajak. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, faktor-faktor ekonomi perlu disertakan untuk melihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, inflasi dan keterbukaan ekonomi terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan Teori Keynes dan Teori Romer-Lucas.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik dan *World Bank*. Pendekatan yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan data runtut waktu tahun 1984 – 2015. Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak dengan variabel pendapatan perkapita, inflasi dan keterbukaan ekonomi sebagai variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi mempengaruhi penerimaan pajak secara negatif signifikan dan keterbukaan ekonomi mempengaruhi penerimaan pajak secara positif signifikan. Sementara itu, variabel pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: Penerimaan pajak, Pendapatan perkapita, Inflasi, Keterbukaan ekonomi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya bagi penulis. Rasa syukur tiada henti akan kekuatan yang selalu diberikan oleh Allah SWT kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Indonesia.*" Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, bantuan dan motivasi bagi penulis selama proses penulisan skripsi.

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan FEB Undip yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjalani pendidikan Strata 1 di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip.
2. Akhmad Syakir Kurnia Ph.D. selaku Ketua Jurusan IESP FEB Undip yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat.
3. Prof. Dr. H. Miyasto, SU. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk membagi ilmunya, memberikan pendampingan, berdiskusi, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto M.Sc. Ph.D. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menjalani studi di FEB Undip.
5. Seluruh dosen FEB Undip yang senantiasa membagi ilmunya kepada penulis dan seluruh staff FEB Undip yang telah memberikan pelayanan yang baik.
6. Papa Rio Hananto, S.H. yang selalu sabar memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih kepada Mama Wahyu Dwijayanti, S.H. yang memberikan motivasi dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Andriana Dwi Hestyani yang menjadi sumber semangat penulis, tiada hentinya memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Anggoro Abdurrahman untuk segala bantuan, canda serta motivasi bagi penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta canda tawa yang tiada hentinya bagi penulis. Agitta Raras, Luthfiana, Callista, Taufik Septa, Rizki Julia, Yoan Nabilah, Oktarina, Varif Alvalah.
10. Teman-teman IESP angkatan 2012, terkhusus untuk Nadya Ayu, Afiani, Wilda Rizkilia, Yossi Atika dan Maylasari yang senantiasa membantu penulis selama menjalani studi.
11. Devi Intan, Indra Laksana, Felicia, Indra Aryudanto dan Rifqi Hafizuddin yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
12. Citra, Bkti, Endah, Alan, Wahid, Ratu Ahdini, Ilham dan Annisa Eka yang senantiasa membantu penulis kala mendapat kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Kepada Mbak Yunita dan Mbak Intan yang selalu memberikan arahan dan semangat bagi penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semarang, 4 Maret 2017

Penulis,

Ria Indriastuti

NIM. 12020112140042

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 <i>Research Gap</i>	14
1.3 Rumusan Masalah	18
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Landasan Teori	22
2.1.1 Kebijakan Fiskal Pemerintah	22
2.1.2 Penerimaan Pajak	24
2.1.2.1 Fungsi Pajak	25
2.1.2.2 Asas-asas pemungutan pajak	26
2.1.2.3 Komponen Penerimaan Perpajakan dalam APBN	31
2.1.2.4 <i>Tax Ratio</i>	37
2.1.3 Pendapatan Perkapita	38
2.1.4 Inflasi	39
2.1.4.1 Jenis-jenis Inflasi	40

2.1.5 Keterbukaan Ekonomi	40
2.1.6 Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.....	42
2.1.6.1 Hubungan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak	42
2.1.6.2 Hubungan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak	44
2.1.6.3 Hubungan Keterbukaan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak	45
2.2 Penelitian Terdahulu.....	47
2.3 Kerangka Pemikiran	53
2.4 Hipotesis Penelitian	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	57
3.1.1 Variabel Penelitian.....	57
3.1.2 Definisi Operasional	57
3.2 Jenis dan Sumber Data	59
3.3 Metode Pengumpulan Data	59
3.4 Metode Analisa.....	59
3.4.1 Model Regresi Linier Berganda.....	59
3.4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	61
3.4.2.1 Deteksi Normalitas.....	61
3.4.2.2 Deteksi Autokorelasi.....	62
3.4.2.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	63
3.4.2.4 Deteksi Multikolinearitas	64
3.4.3 Uji Signifikansi.....	65
3.4.3.1 Uji Statistik (Uji t).....	65
3.4.3.2 Uji Simultan (Uji F)	65
3.4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Perekonomian Indonesia	67
4.2 Perkembangan Penerimaan Pajak	70
4.3 Perkembangan Pendapatan Perkapita.....	76
4.4 Perkembangan Inflasi	78
4.5 Perkembangan Keterbukaan Ekonomi	80

4.6 Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	82
4.6.1 Persamaan Regresi Linier Berganda.....	82
4.6.1.1 Deteksi Normalitas.....	82
4.6.1.2 Deteksi Autokorelasi.....	83
4.6.1.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	84
4.6.1.4 Deteksi Multikolinearitas	84
4.6.2 Persamaan Regresi Linier Berganda dengan Lag Variabel Dependen	85
4.6.2.1 Deteksi Normalitas.....	86
4.6.2.2 Deteksi Autokorelasi.....	86
4.6.2.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	87
4.6.2.4 Deteksi Multikolinearitas	88
4.7 Hasil Uji Statistik Analisis Regresi	88
4.7.1 Uji Statistik (Uji t)	90
4.7.2 Uji Simultan (Uji F).....	91
4.7.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	92
4.8 Intrepretasi Hasil dan Pembahasan.....	92
4.8.1 Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak	92
4.8.2 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak.....	93
4.8.3 Pengaruh Keterbukaan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak.....	94
4.8.4 Pengaruh Penerimaan Pajak di Masa Lalu terhadap Penerimaan Pajak	
.....	95
BAB V PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Keterbatasan Penelitian	98
5.3 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	<i>Tax Ratio</i> Beberapa Negara ASEAN Tahun 2012	3
Tabel 1.2	<i>Tax Buoyancy</i> Beberapa Negara ASEAN Tahun 2012	4
Tabel 1.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015.....	5
Tabel 1.4	<i>Research Gap</i>	17
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	50
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2015	73
Tabel 4.2	Hasil Uji Jarque-Bera	82
Tabel 4.3	Hasil Uji Durbin-Watson	83
Tabel 4.4	Hasil Uji White	84
Tabel 4.5	Hasil Uji VIF	85
Tabel 4.6	Hasil Uji Jarque-Bera	86
Tabel 4.7	Hasil Uji Durbin-Watson	86
Tabel 4.8	Hasil Uji Breusch-Godfrey	87
Tabel 4.9	Hasil Uji White	87
Tabel 4.10	Hasil Uji VIF	88
Tabel 4.11	Hasil Regresi Persamaan Penerimaan Pajak	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun 2011-20159
Gambar 1.2	Keterbukaan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-201511
Gambar 1.3	Inflasi Indonesia Tahun 2011-201512
Gambar 2.1	Arus Lingkar Pemungutan Pajak29
Gambar 2.2	Insidens Pajak Pendapatan Perseorangan32
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran55
Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1984-201568
Gambar 4.2	Perkembangan Penerimaan Pajak Indonesia71
Gambar 4.3	Perkembangan <i>Tax Ratio</i> Indonesia75
Gambar 4.4	Perkembangan Pendapatan Perkapita Indonesia77
Gambar 4.5	Perkembangan Inflasi Indonesia78
Gambar 4.6	Perkembangan Keterbukaan Ekonomi Indonesia80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Data Penelitian	104
Lampiran B. Hasil Output Regresi dan Uji Asumsi Klasik	106
Lampiran C. Hasil Output Regresi dan Uji Asumsi Klasik dengan Lag Variabel Dependen	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan kegiatan yang lazim dijalankan oleh suatu negara. Proses pembangunan yang dicapai setiap negara akan berbeda-beda, tetapi tujuan utama dari pembangunan tersebut tentu untuk mencapai kemakmuran baik bagi masyarakatnya maupun bagi negara itu sendiri. Suatu proses pembangunan menggambarkan keadaan yang dijalankan oleh masyarakat yang memiliki keinginan untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Jhingan (2012) melihat bahwa pembangunan bukan hanya sekadar menaikkan *Gross National Product*, melainkan juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakatnya. Kondisi tersebut tercermin melalui peningkatan taraf hidup masyarakat serta meningkatnya kemampuan negara dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, maka dari itu Jhingan mendefinisikan pembangunan merupakan proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang.

Banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menjalankan pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian yang kokoh. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah melalui kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang tepat akan mampu membantu terciptanya pembangunan yang ideal. Kebijakan yang dijalankan akan berbeda-beda di setiap negara karena adanya kultur sosial, ekonomi dan geografis yang berbeda antar negara.

Terdapat dua kebijakan yang diatur oleh pemerintah, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang, mengubah suku bunga, dan mengendalikan jumlah uang beredar, sedangkan kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah (Nanga, 2001).

Jhingan (2012) menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang erat kaitannya dengan pola memperbesar maupun memperkecil pendapatan negara. Instrumen yang digunakan ialah penerimaan dan pengeluaran negara. Jhingan mengatakan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran dalam rencana pembangunan. Pendapatan negara memiliki tujuan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintah, mendukung program pembangunan bagi negara dan pemerintah terus berupaya mendorong pendapatan negara.

Sumber pendapatan negara dapat berasal dari penerimaan bukan pajak, penerimaan pajak, dan hibah. Penerimaan bukan pajak merupakan pendapatan yang salah satu sumbernya didapatkan dari penerimaan sumber daya alam. Sedangkan penerimaan pajak dipungut melalui berbagai macam objek pemungutan, diantaranya adalah penghasilan yang didapatkan Wajib Pajak, nilai transaksi yang dilakukan dari pembelian barang atau jasa kena pajak, kekayaan Wajib Pajak misalnya berupa bangunan maupun tanah, dll.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diandalkan oleh pemerintahan di seluruh dunia, baik pada negara maju maupun negara berkembang, tak terkecuali bagi pemerintahan di negara yang berada di kawasan

ASEAN yang mayoritas anggotanya adalah negara dengan kondisi berkembang.

Tabel 1.1
***Tax Ratio* Beberapa Negara ASEAN Tahun 2012 (dalam persen)**

Negara	<i>Tax Ratio</i>
Malaysia	15,61
Thailand	15,45
Laos	14,83
Singapura	13,85
Filipina	12,88
Indonesia	11,38
Kamboja	11,09

Sumber : *World Bank*, 2012, diolah

Tabel 1.1 menyajikan *tax ratio* di beberapa negara ASEAN tahun 2012. *Tax ratio* merupakan salah satu indikator dalam penerimaan perpajakan yang dapat dihitung dengan membagi total penerimaan pajak dengan total Produk Domestik Bruto atau PDB.

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa Malaysia mencatatkan nilai *tax ratio* paling tinggi di kawasan ASEAN pada tahun 2012, yaitu sebesar 15,61%, dan disusul oleh Thailand serta Laos yang masing-masing nilai *tax ratio*-nya adalah 15,45% dan 14,83%. Posisi keempat adalah negara Singapura dengan nilai *tax ratio* sebesar 13,85% dan posisi kelima adalah negara Filipina dengan nilai *tax ratio* sebesar 12,88%. Indonesia dengan nilai *tax ratio* sebesar 11,38% berada pada posisi enam dan hanya unggul dari Kamboja yang memiliki nilai *tax ratio* sebesar 11,09%.

Nilai *tax ratio* Indonesia sebesar 11,38% memperlihatkan bahwa kontribusi pendapatan negara dari sektor perpajakan terhadap PDB masih rendah. Maka dari itu, posisi Indonesia jika dilihat melalui *tax ratio* jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand, Laos, Singapura dan Filipina.

Tabel 1.2
***Tax Buoyancy* Beberapa Negara ASEAN Tahun 2012 (dalam persen)**

Negara	<i>Tax Buoyancy</i>
Laos	2,75
Kamboja	2,58
Singapura	2,38
Malaysia	2,26
Indonesia	2,02
Filipina	1,97
Thailand	0,43

Sumber : *World Bank*, 2012, diolah

Selain *tax ratio* Indonesia yang rendah, *tax buoyancy* Indonesia juga rendah dan hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakmaksimalan dalam pemungutan pajak. *Tax buoyancy* merupakan gambaran kinerja pemungutan pajak yang dapat dihitung dengan membagi pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Tabel 1.2 memperlihatkan *tax buoyancy* beberapa negara ASEAN pada tahun 2012. Peringkat pertama *tax buoyancy* dengan persentase tertinggi adalah Laos dengan 2,75%, dan disusul oleh Kamboja di peringkat kedua dan Singapura di peringkat ketiga dengan nilai *tax buoyancy* masing-masing adalah 2,58% dan 2,38%. Malaysia yang memiliki nilai *tax buoyancy* sebesar 2,26% berada pada posisi empat dan Indonesia berada di posisi lima dengan nilai *tax buoyancy* sebesar 2,02% dan unggul dari Filipina dan Thailand.

Nilai *tax buoyancy* Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan Laos, Kamboja, Singapura dan Malaysia, mengindikasikan bahwa adanya ketidakmaksimalan dalam pemungutan pajak di Indonesia.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015 (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak			<i>Tax Ratio</i>
	Target	Realisasi	Persentase	Persentase
2011	878.685	873.873	99,45	11,15
2012	1.016.237	980.518	96,48	11,38
2013	1.148.364	1.077.306	93,81	11,28
2014	1.246.106	1.146.865	92,03	10,85
2015	1.489.255	1.240.418	83,29	10,74

Sumber : Kementerian Keuangan dan *World Bank*, 2015, diolah

Keadaan penerimaan pajak di Indonesia yang belum maksimal dapat terlihat dalam Tabel 1.3 yang memperlihatkan target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak dan persentase realisasi terhadap penerimaan pajak. Diketahui bahwa selama tahun 2011 hingga tahun 2015, target penerimaan pajak selalu ditingkatkan oleh pemerintah. Begitu pula dengan realisasi penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Akan tetapi jika dihitung berdasarkan persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2015, persentase pencapaian realisasi terhadap target penerimaan pajak selalu menurun.

Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan target sebesar 878.685 miliar rupiah dan realisasi yang tercapai saat itu mencapai 873.873 miliar rupiah, sehingga persentase tercapainya realisasi terhadap target adalah sebesar 99,45%. Pada tahun 2012, target yang ditetapkan adalah sebesar 1.016.237 miliar rupiah dan realisasi penerimaan pajak saat itu adalah 980.518 miliar rupiah, sehingga persentase tercapainya realisasi terhadap target adalah 96,48%. Persentase tercapainya realisasi terhadap target penerimaan pajak di tahun 2012 menurun dibandingkan tahun 2011 dan persentase tersebut semakin menurun hingga pada tahun 2015

dengan persentase realisasi terhadap target penerimaan pajak hanya mencapai 83,29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga tahun 2015, target yang ditetapkan tidak pernah tercapai dan adanya kecenderungan yang semakin menurun pada persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target yang telah ditentukan.

Pada Tabel 1.3 turut memperlihatkan perkembangan *tax ratio* Indonesia selama tahun 2011 hingga 2015. Tahun 2011 tercatat *tax ratio* Indonesia adalah sebesar 11,15%, dan mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi sebesar 11,38%. Pada tahun 2013 nilai *tax ratio* justru menurun menjadi 11,28% dan kembali turun di tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masing adalah sebesar 10,85% dan 10,74%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kecenderungan penurunan nilai *tax ratio* dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Kecenderungan yang menurun pada nilai *tax ratio* di atas mengindikasikan bahwa belum maksimalnya peranan penerimaan pajak terhadap PDB. Nilai *tax ratio* yang rendah dapat pula diartikan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak masih sangat kecil.

Basri dan Munandar (2009) mengatakan bahwa terdapat 4 hal yang mendasar dalam masalah pengembangan pajak di Indonesia. Empat hal tersebut timbul baik dari sisi internal penyelenggara pemungutan pajak maupun dari sisi eksternal. Masalah pengembangan pajak yang terjadi di Indonesia diantaranya disebabkan oleh kesadaran membayar pajak masih rendah, kualitas pelayanan pajak yang rendah, lemahnya penggalan potensi pajak dan politisasi serta korupsi pajak.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) berjumlah 44,8 juta orang, namun baru 26,8 juta orang yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan hanya 10,3 juta diantaranya yang menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT, sedangkan Wajib Pajak Badan tahun 2014 yang telah terdaftar berjumlah 1,2 juta perusahaan, namun baru 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT yang itu artinya bahwa persentase Wajib Pajak Pribadi yang menyampaikan SPT hanya sebesar 22,99% dan persentase Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT adalah sebesar 45,83%.

Persentase penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia masih sangat rendah. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh dari *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*, persentase partisipasi masyarakat Singapura dalam membayar pajak di tahun 2013 mencapai lebih dari 60%. Penerimaan pajak di Singapura didominasi oleh *corporate income tax, individual tax* dan *good and services tax*. Jika dibandingkan dengan persentase partisipasi masyarakat Indonesia yang membayar pajak tentu sangat berbeda. Padahal dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah, Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan Singapura. Namun, Singapura telah memiliki basis pemerintahan yang baik dimana tingkat korupsi sangat rendah, pelayanan yang efisien dan efektif dan kondisi perekonomiannya sangat maju, hal tersebut tentu memberikan pengaruh ataupun dorongan baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Singapura untuk membayarkan pajaknya demi kemajuan negara dan kesejahteraan bersama.

Sepanjang tahun 2011 hingga 2015, pemerintah melakukan beberapa perubahan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan, yang salah satunya mengenai

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada tahun 2014 pemerintah kehilangan potensi penerimaan akibat peraturan baru mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semula bagi penduduk yang belum menikah PTKP ditentukan sebesar Rp 15.840.000,00 dalam setahun menjadi Rp 24.300.000,00 dalam setahun. Tahun 2015 pemerintah kembali membuat kebijakan kenaikan PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan ini menjelaskan tentang kebijakan baru berupa perubahan PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula Rp 24.300.000,00 menjadi Rp 36.000.000. Kebijakan tersebut memberikan andil berkurangnya potensi pajak yang diperoleh pemerintah pusat, khususnya adalah hilangnya potensi peningkatan penerimaan pada Pajak Penghasilan atau PPh.

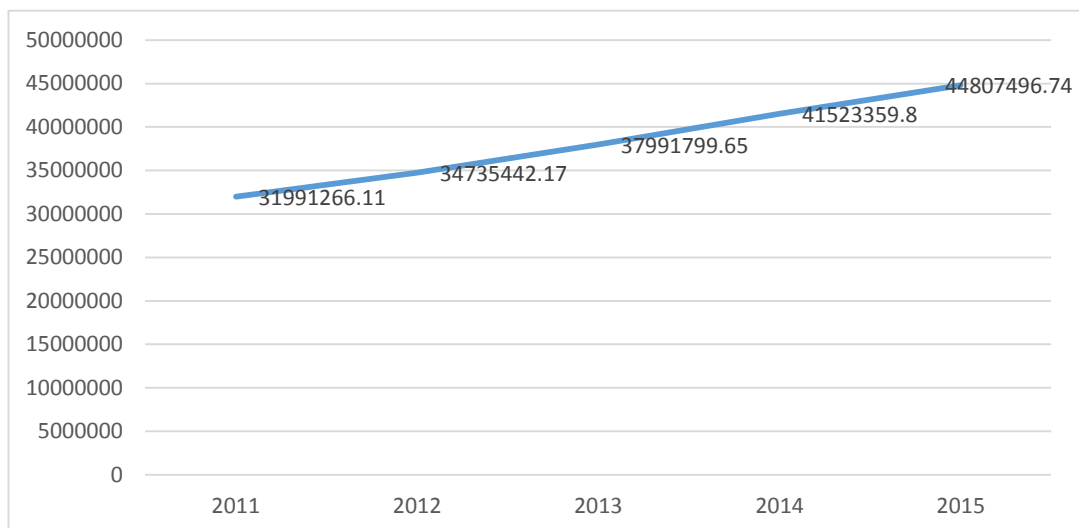
Penerimaan pajak yang belum maksimal tidak hanya dipengaruhi dari sisi kepatuhan Wajib Pajak, kualitas pelayanan pegawai pajak, lemahnya penggalian potensi dan korupsi pajak. Faktor-faktor yang timbul dari sisi ekonomi seperti, pendapatan perkapita, inflasi dan keterbukaan ekonomi turut memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Gupta (2007) menyebutkan pendapatan perkapita dan perdagangan luar negeri dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Lebih jauh, Gupta menyatakan bahwa kebijakan mengenai perpajakan selalu menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan negara, namun bagian penting tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, melainkan juga untuk mencapai pola yang tepat dari alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi agar pembangunan dapat dirasakan secara merata. Sookram dan Saridakis (2009) menyatakan bahwa

pendapatan perkapita merupakan indikator yang baik dari keseluruhan tingkat pembangunan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka kapasitas membayar dan mengumpulkan penerimaan pajak akan semakin besar. Hasil penelitian dari Sookram dan Saridakis turut mendukung hasil penelitian dari Gupta bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak.

Pendapatan perkapita yang dapat dihitung dengan membagi total Produk Domestik Bruto (PDB) dengan total penduduk, menggambarkan nilai PDB per satuan penduduk dalam suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita dapat menjadi indikator yang baik dalam menjelaskan perkembangan ekonomi di suatu negara, termasuk tingkat kemakmuran masyarakatnya.

Gambar 1.1
Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun 2011 - 2015 (dalam Rupiah)



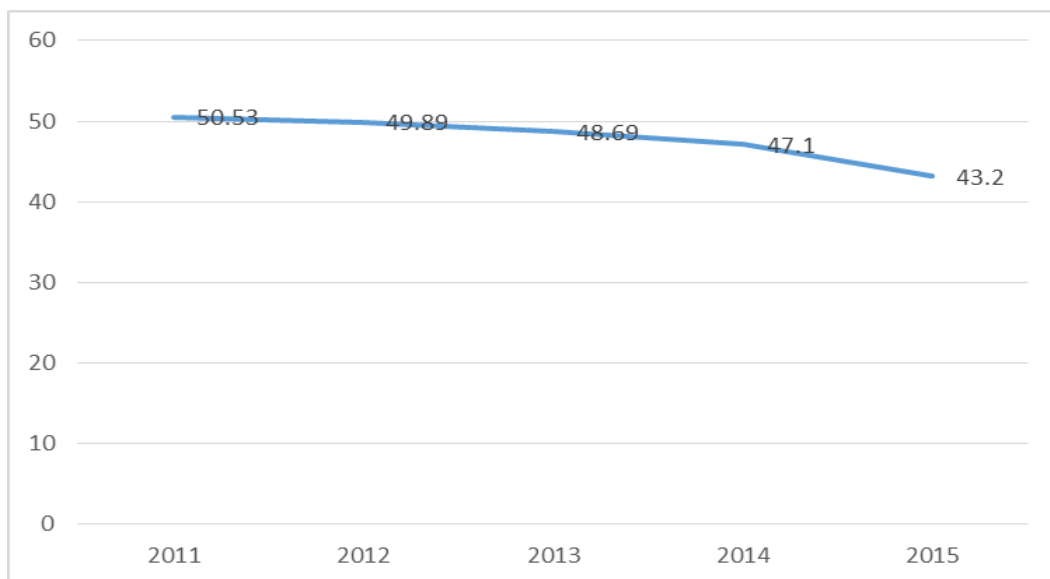
Sumber : *World Bank*, 2013, diolah

Gambar 1.1 memperlihatkan perkembangan pendapatan perkapita Indonesia selama tahun 2011 hingga tahun 2015. Terlihat bahwa selama 5 tahun, pendapatan

perkapita di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat bahwa pendapatan perkapita Indonesia mencapai 31.991.266,11 rupiah dan terus meningkat hingga pada tahun 2015 pendapatan perkapita Indonesia mencapai hingga 44.807.496,74. Walaupun pendapatan perkapita Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan laporan *World Bank* pada tahun 2016 diketahui bahwa Indonesia masuk ke dalam negara dengan kategori pendapatan *lower-middle*. Kategori ini diperuntukkan bagi negara dengan pendapatan perkapita \$1.026 hingga \$4.035. Pendapatan perkapita memiliki hubungan dengan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Jika pendapatan perkapita meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan turut meningkat dikarenakan objek pengenaan pajak penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh baik oleh orang pribadi maupun badan.

Dalam pelaksanaannya, pajak penghasilan diatur dengan pengenaan tarif yang biasanya bersifat progresif atau semakin besar seiring dengan tingginya pendapatan yang diperoleh. Pengenaan tarif pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1). Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan 0 – 50 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 5%, penghasilan 50 juta rupiah – 250 juta rupiah akan dikenakan tarif sebesar 15%, penghasilan di atas 250 juta rupiah – 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25% dan penghasilan di atas 500 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Gambar 1.2
Keterbukaan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2015 (dalam persen)



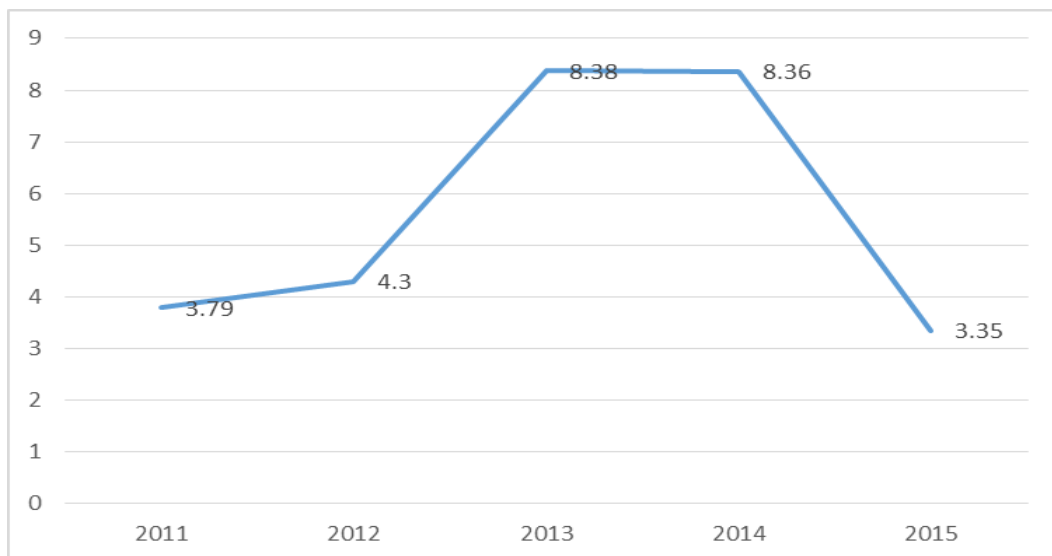
Sumber : *World Bank*, 2015, diolah

Gupta (2007) menyebutkan bahwa selain pendapatan perkapita, sektor perdagangan luar negeri turut memberikan pengaruh yang positif bagi penerimaan pajak. Gambar 1.2 memperlihatkan perkembangan keterbukaan ekonomi di Indonesia tahun 2011 – 2015 yang dapat menggambarkan keadaan perdagangan luar negeri Indonesia. Keterbukaan ekonomi merupakan rasio ekspor – impor terhadap Produk Domestik Bruto. Keterbukaan ekonomi yang meningkat dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya. Jika dilihat melalui Gambar 1.2 keterbukaan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2015, dimana saat itu pertumbuhan ekonomi sedang mengalami perlambatan.

Penurunan pada ekspor dan impor dapat menyebabkan penerimaan pajak

menjadi turun, khususnya pada penerimaan pajak yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah impor di tahun 2015 mengalami penurunan. Realisasi PPN dan PPnBM impor tahun 2015 tercatat 134.039 miliar rupiah, turun 13,06% dari PPN dan PPnBM impor tahun 2014 yang tercatat sebesar 157.639 miliar rupiah.

Gambar 1.3
Inflasi Indonesia Tahun 2011 – 2015 (dalam persen)



Sumber : *World Bank, 2015*, diolah

Gambar 1.3 memperlihatkan perkembangan inflasi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2011 hingga 2015. Inflasi merupakan keadaan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan secara terus menerus selama periode tertentu. Sinaga (2010) dan Kusmono (2011) menyatakan dalam penelitiannya bahwa inflasi berdampak terhadap penerimaan pajak. Pada tahun 2011 tingkat inflasi tergolong rendah yaitu sebesar 3,79%. Tingkat inflasi yang rendah dapat mendorong

pertumbuhan konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut dapat menguntungkan bagi penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Tahun 2012 hingga tahun 2014 keadaan inflasi justru semakin meningkat, di tahun 2012 tingkat inflasi tercatat sebesar 4,3%, tahun 2013 inflasi terjadi hingga mencapai 8,38% dan tahun 2014 turun sedikit menjadi 8,36%. Salah satu penyebab kenaikan tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kemudian menjalar hingga kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Namun, pada tahun 2015 di tengah perlambatan ekonomi global, tingkat inflasi Indonesia justru membaik, tercatat inflasi yang terjadi pada tahun 2015 adalah sebesar 3,35%. Tingkat inflasi tersebut lebih kecil dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 4,4%.

Tingkat inflasi yang dapat dijaga dengan rendah dan stabil tentu akan memiliki dampak yang baik bagi kegiatan perekonomian. Dampak tersebut khususnya akan berkaitan dengan konsumsi masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil akan meningkatkan konsumsi masyarakat, salah satu sektor yang diuntungkan dari meningkatnya konsumsi masyarakat adalah sektor perpajakan. Jika konsumsi masyarakat akan barang dan jasa meningkat maka penerimaan pajak berupa PPN dan PPnBM akan turut meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pengaruh variabel independen yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia tahun 1984-2015 diantaranya adalah pendapatan perkapita, inflasi dan keterbukaan ekonomi.

1.2 Research Gap

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak banyak menarik perhatian peneliti di dunia. Penelitian tersebut tentu menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Perbedaan dalam hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Joweria M. Teera dan John Hudson (2004) yang berjudul “*Tax Performance: A Comparative Study*” menunjukkan hasil penelitian bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang positif namun tidak selalu signifikan terhadap penerimaan pajak. Pendapatan perkapita pada negara dengan *low income* dan *upper-middle income* berpengaruh tidak signifikan, sedangkan pendapatan perkapita pada negara dengan *high income* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian Danny Wibowo (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Perkapita, *Economic Growth Rate*, *Economic Structure*, dan *Tax Rate* terhadap *Tax Ratio* pada Negara-Negara OECD dan Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh tidak signifikan pada penerimaan pajak.

Berbeda dengan penelitian Abhijit Sen Gupta (2007) yang berjudul “*Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB perkapita merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian Sandra Sookram dan George Saridakis (2009) yang berjudul “*The Effect of Economic Factors on the Tax Ratio in Trinidad and Tobago*” juga menyimpulkan hal yang sama dengan Gupta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak. Tingkat pendapatan perkapita yang semakin besar secara bersamaan akan meningkatkan kapasitas dalam mengumpulkan dan membayar pajak.

Penelitian Eddi Wahyudi, dkk (2009) yang berjudul “Pengaruh *Economic Shock* terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Pajak di Indonesia” menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian Almira Herna Renata, dkk (2016) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai” turut memiliki hasil penelitian yang sama dengan Eddi Wahyudi bahwa, inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berbeda dengan penelitian Andar Rohnal Sinaga (2010) yang berjudul “Pengaruh Variabel-Variabel Makroekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang inflasi akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Penelitian Heru Kusmono (2011) yang berjudul “Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia” memiliki pandangan yang sama dengan Sinaga. Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang karena apabila harga naik maka tiap lembar uang yang dihasilkan hanya akan mampu membeli barang atau jasa dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelum terjadi inflasi.

Hasil Penelitian Joweria M. Teera dan John Hudson (2004) yang berjudul “*Tax Performance: A Comparative Study*” menunjukkan bahwa *openness* atau keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak selalu signifikan terhadap penerimaan pajak. Keterbukaan ekonomi pada negara *upper-middle income* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian Sandra Sookram dan George Saridakis (2009) yang berjudul “*The Effect of Economic Factors on the Tax Ratio in Trinidad and Tobago.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax ratio*.

Berbeda dengan penelitian Abhijit Sen Gupta (2007) yang berjudul “*Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan terbuka berpengaruh signifikan terhadap performa penerimaan, setiap kenaikan kegiatan impor akan mampu meningkatkan penerimaan yang diperoleh pemerintah melalui penerimaan pajak. Penelitian Micah Samuel Gaalya (2015) yang berjudul “*Trade Liberalization and Tax Revenue Performance in Uganda*”. Menunjukkan hasil penelitian bahwa keterbukaan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

Tabel 1.4
Research Gap

No	Permasalahan	Research Gap	Peneliti	Judul
1	Pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak.	Pendapatan perkapita berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.	Joweria M. Terra dan John Hudson (2004) Danny Wibowo (2013)	<i>Tax Performance: A Comparative Study.</i> Pengaruh Pendapatan Perkapita, <i>Economic Growth Rate, Economic Structure</i> , dan <i>Tax Rate</i> terhadap <i>Tax Ratio</i> pada Negara-Negara OECD dan Indonesia.
		Pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.	Abhijit Sen Gupta (2007) Sandra Sookram dan George Saridakis (2009)	<i>Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries.</i> <i>The Effect of Economic Factors on the Tax Ratio in Trinidad and Tobago.</i>
2	Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak.	Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.	Eddi Wahyudi, dkk (2009) Almira Herna Renata, dkk (2016)	Pengaruh <i>Economic Shock</i> terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Pajak di Indonesia. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
		Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak.	Andar Rohnal Sinaga (2010) Heru Kusmono (2011)	Pengaruh Variabel-variabel Makroekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia.

Tabel 1.4
Research Gap (lanjutan)

No	Permasalahan	Research Gap	Peneliti	Judul
3	Pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap penerimaan pajak.	Keterbukaan ekonomi berpengaruh positif namun tidak selalu signifikan terhadap penerimaan pajak.	Joweria M. Terra dan John Hudson (2004) Sandra Sookram dan George Saridakis (2009)	<i>Tax Performance: A Comparative Study.</i> <i>The Effect of Economic Factors on the Tax Ratio in Trinidad and Tobago.</i>
		Keterbukaan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.	Abhijit Sen Gupta (2007) Micah Samuel Gaalya (2015)	<i>Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries.</i> <i>Trade Liberalization and Tax Revenue Performance in Uganda.</i>

Sumber : Berbagai Jurnal Ekonomi Pembangunan

1.3 Rumusan Masalah

Penerimaan pajak menjadi sumber yang diandalkan oleh pemerintahan di seluruh dunia karena perolehannya telah diatur dengan jelas dalam perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara berkembang turut menggantungkan pendapatan negara negara melalui sektor perpajakan. Walaupun sektor perpajakan diandalkan, namun masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Pertama, target yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai. Kedua, realisasi penerimaan pajak yang semakin meningkat tidak membuat persentasenya terhadap target penerimaan pajak turut meningkat, melainkan semakin turun selama tahun 2011-2015. Ketiga, faktor-faktor ekonomi yang dapat menunjang peningkatan

penerimaan pajak belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pendapatan perkapita yang masih rendah, inflasi yang tinggi dan rendahnya nilai keterbukaan ekonomi menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan diatas maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak di Indonesia tahun 1984 - 2015?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak dalam perekonomian di Indonesia tahun 1984 - 2015?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak dalam perekonomian di Indonesia tahun 1984 - 2015?
4. Bagaimana pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap penerimaan pajak dalam perekonomian di Indonesia tahun 1984 – 2015?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perkembangan penerimaan pajak di Indonesia tahun 1984 - 2015.
2. Menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak dalam perekonomian di Indonesia tahun 1984 – 2015.
3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak dalam perekonomian di Indonesia tahun 1984 – 2015.
4. Menganalisis pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap penerimaan pajak dalam perekonomian di Indonesia tahun 1984 – 2015.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan fiskal yang khususnya dalam hal penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik.
2. Sebagai referensi dan bahan acuan serta sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang memiliki minat penelitian mengenai penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai masalah penerimaan pajak di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan mengenai *research gap*, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis serta penjelasan mengenai penerimaan pajak, pendapatan perkapita, inflasi dan keterbukaan ekonomi.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan serta metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian atau penjelasan hasil penelitian berupa deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan interpretasi hasil.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi kebijakan dan saran penelitian bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan tema atau topik sejenis.